

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam periode tertentu apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.¹⁸ Pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari kenaikan dari *Gross Domestic Product* (GDP) dengan tidak melihat apakah ada kenaikan yang besar atau kecil dari pertumbuhan penduduk ataupun mengalami perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator dalam menilai kualitas pembangunan sebuah negara.

Dalam jangka waktu yang panjang tentu pertumbuhan ekonomi adalah sebuah masalah. Apabila dilihat dalam sudut pandang ekonomi, perkembangan perekonomian memiliki dua efek penting yakni kemakmuran atau meningkatnya taraf hidup masyarakat dan mampu menciptakan peluang kerja yang baru dengan bertambahnya jumlah penduduk.¹⁹ Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah cerminan aktivitas ekonomi yang ada. Dimana dapat memiliki nilai positif dan juga negatif. Peryumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa perekonomian tersebut mengalami peningkatan dalam periode tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menandakan bahwa aktivitas ekonomi mengalami penurunan dalam periode tertentu.

¹⁸ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 9.

¹⁹ Didin S Damanhuri Dan Muhammad Findi, *Masalah Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, hlm 60.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan kunci didalam pertumbuhan ekonomi makro. Yang didalamnya mempunyai alasan utama, yaitu: *Pertama*, penduduk selalu bertambah. Adanya penambahan jumlah penduduk tentu juga menambah jumlah angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari adanya pertumbuhan angkatan kerja, maka akan terjadi pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. *Kedua*, ketika sebuah keinginan dan kebutuhan masyarakat tentang barang dan jasa tidak terbatas, maka sebuah perekonomian harus mampu untuk memenuhinya. *Ketiga*, usaha didalam pemerataan ekonomi dan stabilitas ekonomi melalui redistribusi pendapatan akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.²⁰

a. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa macam teori yang berkembang dalam menentukan suatu pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Adam Smith, dalam pertumbuhan output ekonomi terdiri dari tiga unsur yaitu: adanya sumber daya alam, adanya sumber daya manusia, dan adanya stok kapital. Adam Smith juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebuah perpaduan dari proses bertambahnya jumlah penduduk dan juga berkembangnya kemajuan teknologi.²¹
- 2) Menurut John Stuart Mill sebuah pembangunan ekonomi bergantung kepada dua hal perbaikan yakni perbaikan dari tingkat pengetahuan masyarakat dan usaha dalam menghilangkan penghambat sebuah pembangunan, seperti adat istiadat

²⁰ Soeratno, Ekonomi Makro Pengantar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta, 2004 hlm. 6

²¹ Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Kebijakan. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Bima Grafika. hlm 280

dll. Menurut Harrod Domar pertambahan produksi dan pendapatan masyarakat tidak ditentukan dari besarnya sebuah produksi, melainkan dari pengeluaran masyarakat itu sendiri. Dengan demikian walau kapasitas produksi semakin bertambah, pendapatan akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan tercipta jika pengeluaran masyarakat semakin meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.²²

- 3) Robert Solow mengemukakan pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah rangkaian yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Solow menekankan bahwa pentingnya peran kemajuan teknologi didalam setiap proses suatu produksi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan atau *sustainable*.²³

Selain itu dalam perkembangannya teori pertumbuhan ekonomi dibagi kedalam beberapa fase:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, sumberdaya alam, dan teknologi yang digunakan. Menurut teori ini pertambahan penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, teori ini mengasumsikan luas tanah atau sumberdaya alam, modal dan teknologi tidak mengalami perubahan.

²² Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Kebijakan. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Bima Grafika. hlm 287

²³ Hadiyanto, Tommy. 2012. Dampak Investasi Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tesis : Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik berkembang sejak 1950 dimana tokoh dalam perintisnya antara lain Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E Maede. Dalam pandangannya mengungkapkan bahwa pertumbuhan neo klasik didasari pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal yang digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini adalah perkembangan dari teori makro Keynes. Menurut Harrod Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian pendapatan nasionalnya untuk menambah atau mengganti barang-barang modal.

4. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa-jiwa usaha (entrepreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil resiko.

b. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

1) Faktor Ekonomi

Faktor produksi sebagai kekuatan yang utama untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi naik atau turun merupakan

sebuah konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi tersebut diantaranya:

a) Sumber Alam

Sumber alam merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Negara yang memiliki sumber daya alam sedikit maka tidak akan mampu membangun dengan cepat. Negara yang kurang berkembang biasanya sumber daya alamnya terbengkalai karena kurang mampu mengelolanya. Hal itu menunjukkan bahwa sumber daya alam saja tidak cukup, tetapi harus mampu dimanfaatkan dengan tepat.

b) Akumulasi Modal

Akumulasi modal disini lain mencerminkan permintaan efektif dan dipihak lain menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di suatu negara. Pembentukan modal nantinya juga akan membawa kearah perkembangan teknologi, serta pemanfaatan sumber daya alam, industrialisasi, dan juga ekspansi pasar yang sangat diperlukan dalam kemajuan ekonomi

c) Organisasi

Dalam era sekarang keterlibatan wiraswasta dalam perekonomian sangat banyak berperan. Di negara yang terbelakang masih sangat sedikit sekali peran wiraswastawan, dikarenakan berbagai faktor seperti masih sedikitnya pasar, kurangnya permodalan, tidak adanya perjanjian

kepemilikan swasta, kurangnya buruh terdidik dan terlatih, dan tidak tercukupinya bahan baku, serta fasilitas infrastruktur dan sebagainya.

d) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi dapat juga menaikkan produktivitas para tenaga kerja, modal, dan factor produksi lainnya. Sebagai contoh negara Jepang yang pada awalnya bergerak dari mesin-mesin negara Inggris yang dibuang. Belakangan ini pertumbuhan industri di negara maju terjadi karena mencontoh dari teknomogi negara asing. Setelah perang dunia kedua jepang mampu melakukan inovasi dengan membuat dan memproduksi teknologi yang berkualitas serta mampu mengekspornya ke negara lain,

e) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja dan spesialisasi kerja sejatinya mampu untuk meingkatkan suatu produktivitas. Keduanya akan meningkatkan produksi yang bear dan meingkatkan perkembangan dunia inustri. Jika produksi semakin meluas, maka spesialisasi kerja dan pembagian kerja juga akan meluas. Sehingga produktivitas akan naik dan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

2) Faktor Non Ekonomi

Ada beberapa faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya:²⁴

a) Faktor sosial

²⁴ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Penerjemah: D. Guritno, hlm 74
- 75

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan akan mampu menghasilkan penemuan-penemuan baru dan juga dapat memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktural dan juga nilai-nilai sosial. Penyebaran pendidikan dan juga ilmu pengetahuan dapat mendorong perkembangan ekonomi, sehingga masyarakat dapat menyadari cita-cita dan juga tujuan masa depan mereka dan harus memiliki kemampuan untuk dapat meraihnya. Kedua faktor inilah yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi di negara maju.

b) Faktor Manusia

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya semata-mata bergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, namun lebih pada menekankan pada efisiensi mereka. Pembentukan modal insani yaitu melalui proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan juga kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Proses ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial pada umumnya.

c) Faktor Politik dan Administrasi

Faktor politik dan administrasi mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah administrasi kuat, efisien, dan tidak terdapat perilaku korup maka itulah yang seharusnya pemerintah lakukan didalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu dengan memberikan kebebasan bagi wiraswasta, mampu membuat kebijakan fiskal yang efektif, dan menyediakan fasilitas permodalan. Disisi lain

pemerintah juga dapat memberikan kepastian dalam hal yang prinsip seperti ketertiban, keadilan keamanan dan pertahanan, imbalan yang sepadan dengan kemampuan, penerapan dalam produksi, jaminan dalam menikmati harta kekayaan, hak-hak akan warisan, jaminan bahwa kesepakatan dan perjanjian bisnis dipegang teguh, pengaturan standar takaran, ukuran, dan mata uang serta kestabilan sistem pemerintah juga harus dapat menstimulus adanya pertumbuhan ekonomi.

c. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam dengan tetap memperhatikan pendekatan ilmiah pada umumnya. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah perkembangan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat yang luas. Suatu peningkatan dalam faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk atau membahayakan manusia. Ataupun memproduksi suatu barang yang dilarang oleh syariat Islam. Seperti contoh minuman keras dan sejenisnya.

Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang menyeluruh dalam bidang produksi yang sangat berkaitan erat dengan keadilan dalam distribusi. Pertumbuhan ekonomi mencakup hal yang lebih luas dalam pertumbuhan dan kemajuan aspek materiil dan spiritualitas manusia. Dengan istilah lain, pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dalam kehidupan manusia saja, tetapi juga meliputi aspek hukum, sosial, politik, dan

budaya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif serta kualitatif. Tujuannya adalah bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat, keduanya menurut Islam merupakan sebuah kesatuan yang integral.²⁵ Ada beberapa karakteristik didalam pertumbuhan ekonomi menurut Islam menurut al-Tariqi²⁶, diantaranya: 1) komprehensif, 2) berimbang, 3) realistis, 4) keadilan, 5) bertanggungjawab, 6) mencukupi, 7) berfokus pada manusia.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi

| | | |
|---|--|--|
| Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional | Tingkat pendapatan daerah dibandingkan tingkat pendapatan nasional | |
| | Tinggi ($Y_i > Y$) | Rendah ($Y_i < Y$) |
| Tinggi ($R_i > r$) | Daerah makmur (cepat maju dan cepat tumbuh) | Daerah tertekan (dalam proses membangun) |
| Rendah ($R_i < r$) | Daerah makmur (yang sedang menurun) | Daerah tertekan |

Sumber: Arsyad (2010)

Keterangan:

R_i: laju pertumbuhan pdrb di provinsi i

Y_i: pendapatan perkapita propinsi i

r: laju pertumbuhan pdrb

Y: pendapatan perkapita rata-rata

²⁵ Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1 . No. 2 November 2018

²⁶ Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hlm 301-322

2. Indeks Pembangunan Manusia

a. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *United Nation Development Program* atau UNDP dalam laporan *Human Development Report 1991*, pembangunan manusia merupakan suatu proses meningkatkan pilihan yang lebih banyak bagi manusia untuk hidup (*a process of increasing people options*) atau proses peningkatan kemampuan manusia.²⁷ Indeks pembangunan manusia merupakan sebuah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosi-ekonomi dalam suatu negara, dengan mengkombinasikan antara pencapaian bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan riil perkapita yang telah disesuaikan.

Menurut teori Ramires, tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan suatu penduduk dalam menyerap serta mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik yang berkaitan dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.²⁸ Pembangunan manusia menjadi salah satu indikator pembangunan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur hal tersebut *United Nations Development Program (UNDP)* mengenalkan konsep mutu modal manusia yang dikenal dengan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah. Angka Indeks

²⁷ Badan Pusat Statistik, “*Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2019*”, hlm 31.

²⁸ Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart. 1998. *Economic Growth and Human Capital*. QEH Working Paper No. 18

Pembangunan Manusia berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati nilai 100 maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai Indeks Pembangunan Manusia dibagi kedalam tiga golongan yaitu golongan pertama dengan $IPM < 50$ (Rendah), golongan kedua $50 < IPM < 80$ (Menengah/Sedang) dan golongan ketiga $IPM > 80$ (Tinggi).²⁹

b. Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia

Indikator komposit indeks pembangunan manusia merupakan sebuah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat sebuah pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Ada 3 faktor utama dalam indeks pembangunan manusia yakni kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas kehidupan atau keajahteraan suatu masyarakat, PBB telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan sebuah ukuran standart pembangunan manusia. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pembangunan manusia yaitu:

1) Indeks Kesehatan

Indikator kesehatan dalam indeks pembangunan manusia adalah umur harapan hidup waktu lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) dijadikan sebuah indikator dalam mengukur kesehatan individu ataupun suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk atau individu dalam kurun waktu tertentu. Semakin baik tingkat

²⁹ Todaro, Michael. P. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. hlm 115

perkonomian dan pelayanan kesehatan suatu negara maka akan berakibat pada semakin tinggi pula angka harapan hidup di dalam negara tersebut.³⁰

Angka Harapan Hidup dihitung dengan pendekatan tak langsung atau *indirect estimation*. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (AHL) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sedangkan untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai dengan standar UNDP, dimana angka paling tinggi sebagai batas perhitungan indeks dipakai 85 tahun sedangkan paling rendah 25 tahun. Usia harapan hidup juga bisa panjang jika status kesehatan, gizi, dan lingkungan yang baik.

2) Indeks Pendidikan

Indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan angka minimum adalah 0 sesuai dengan standar UNDP. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu untuk membaca dan menulis, dan nilai 0 mencerminkan kondisi masyarakat yang tidak mampu membaca dan menulis. Rata-rata lama sekolah juga mengindikasikan semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin

³⁰ Beik Syauqi Irfan, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) 2016, hlm 147

tinggi rata-rata lama sekolah berarti juga semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.³¹

3) Indeks Daya Beli

Indikator daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup seseorang. Indikator ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada serta untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produksi sehingga mampu menghasilkan output yang baik berupa barang ataupun jasa sebagai pendapatan. Dan pendapatan tersebutlah yang akan menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran terhadap tingkat daya beli masyarakat sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat pembangunan manusia di suatu wilayah.³²

Ada enam alasan paradigma pembangunan manusia ini dinilai sangat penting yaitu: 1) pembangunan bertujuan akhir untuk meningkatkan harkat serta martabat manusia, 2) mengemban misi dalam pemberantasan kemiskinan, 3) mendorong dalam upaya peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan pengawasan atas barang dan jasa, 4) memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dunia, 5) memperkuat *basic civil society* dan institusi politik dalam upaya pengembangan demokrasi, dan 6) menjaga stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan.³³

c. Indeks Pembangunan Manusia Ditinjau Dalam Maqasid Syariah

³¹ Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi 2*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara). 2000, hlm 165

³² Yunita Mahrany, Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. *Jurnal*, 2012, hlm 23.

³³ Pambudi, *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Institut Pertanian Bogor, 2008.

Islam memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia dan diberikan kelebihan dari Allah SWT daripada makhluk-makhluk lainnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia bahwa dalam Islam tujuannya adalah berkaitan dengan maqasid syariah yang mempunyai lima tujuan umum. Dari lima tujuan tersebut tiga diantaranya menempel langsung pada diri manusia adalah yaitu melindungi jiwa, melindungi akal, dan juga melindungi keturunan. Sedangkan dua lainnya yakni melindungi keimanan dan melindungi harta pendapatan merupakan dua hal yang melekat dalam kehidupan manusia. Dimana tanpa kedua hal tersebut mustahil kehidupan manusia mampu berjalan dengan baik.

Pembangunan manusia pada dasarnya bertujuan kepada kebahagiaan manusia, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Ketika ketiga hal tersebut terpenuhi maka kebahagiaan akan tercapai. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kata *al-falah* disebutkan sebanyak 40 kali., bahkan dalam mengumandangkan azan juga diserukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya kebahagiaan dalam agama Islam. Kebahagiaan sendiri tentunya tidak hanya berkaitan tentang kebahagiaan dalam duniawi saja, tetapi juga bagaimana mencapai kebahagiaan di akhirat. Keseimbangan dua hal itulah merupakan sebuah konsep pembangunan manusia didalam Islam yang terangkum dalam konsep maqasid syariah.³⁴

³⁴ Hasibuan, *Analisis Maqasid Syariah Pada Indeks Pembangunan Manusia*, KASABA: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMY, (11)1, hlm 88-101

Tabel 2.2 Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

| Interval Nilai | Klasifikasi |
|----------------|-----------------|
| IPM < 50 | Rendah |
| 50 < IPM < 80 | Menengah/Sedang |
| IPM > 80 | Tinggi |

Sumber: Todaro (2011)

3. Indeks Kemudahan Berbisnis

a. Definisi Kemudahan Berbisnis

Kemudahan Berbisnis atau *Easy Doing Business Index* adalah salah satu ukuran indeks yang dibuat oleh Bank Dunia atau *World Bank*. Semakin tinggi nilai dan peringkat suatu negara berarti menunjukkan bahwa negara tersebut mempunyai tingkat kemudahan berbisnis yang semakin baik. Negara-negara dengan tingkat kemudahan berbisnis yang baik tentu bisa dibilang negara yang lebih bersahabat dengan para investor. Semakin mudah investor melakukan penanaman modal, semakin besar juga kesempatana negara tersebut untuk mengembangkan sektor-sektor potensial lainnya. Ada 10 indikator yang digunakan dalam mengukur indeks kemudahan berbisnis suatu negara yaitu: (1) memulai usaha (*starting business*), (2) perizinan pendirian bangunan (*dealing with construction permit*), (3) pencatatan tanah dan bangunan (*registering property*), (4) pembayaran pajak (*paying taxes*), (5) kemudahan memperoleh kredit (*getting credit*), (6) pemenuhan kontrak (*enforcing contract*), (7) ketersediaan listrik (*getting electricity*), (8) perdagangan lintas negara (*trading across borders*), (9) penyelesaian perkara pailit (*resolving insolvency*), (10) perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority*)

investors).³⁵ Berikut ini adalah tabel pengukuran bagaimana Indeks Kemudahan Berbisnis diperoleh:

Tabel 2.3 Pengukuran Indeks Kemudahan Berbisnis

| Indikator | Pengukuran |
|----------------------------------|---|
| Memulai bisnis | Prosedur, waktu, biaya, dan setoran modal minimum untuk memulai sebuah perusahaan perseroan terbatas |
| Berurusan dengan izin konstruksi | Prosedur, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan semua formalitas untuk membangun sebuah gudang dan kontrol kualitas dan mekanisme keamanan dalam sistem perizinan konstruksi |
| Mendapatkan listrik | Prosedur, waktu, dan biaya untuk bisa terhubung ke jaringan listrik, keandalan pasokan listrik dan biaya pemakaian listrik |
| Pendaftaran property | Prosedur, waktu, dan biaya untuk mentransfer property dan kualitas sistem administrasi tanah |
| Mendapatkan kredit | Hukum yang mengatur jaminan yang dapat bergerak dan sistem informasi kredit |
| Perlindungan investor minoritas | Hak-hak pemegang saham minoritas di dalam transaksi pihak terkait dan tata kelola perusahaan |
| Pembayaran pajak | Pembayaran, waktu, dan tarif pajak Total bagi perusahaan untuk mematuhi semua peraturan pajak |
| Perdagangan lintas negara | Waktu dan biaya untuk ekspor produk keunggulan komparatif dan impor suku cadang |
| Penegakan kontrak | Waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketa komersial dan kualitas proses peradilan |
| Penyelesaian kepailitan | Waktu, biaya, hasil, dan tingkat pemulihan untuk kepailitan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan |

Sumber: A World Bank Group Flagship Report, 2019

Kriteria lain yang dijadikan penilaian oleh Bank Dunia tapi tidak digunakan dalam pemeringkatan tersebut adalah mempekerjakan pegawai dan kewirausahaan. Kriteria tersebut yang diatas merupakan indikator yang menentukan dan mengukur

³⁵ Bimo Herbowo, Ibu. Skripsi: “Analisis Government Effectiveness, Penerimaan Pajak, Dan Kemudahan Berbisnis Terhadap Korupsi Di Asia Tenggara”. (Jakarta:Uin Jakarta) hlm 26

kemudahan yang digunakan bagi perusahaan dan para investor untuk memulai suatu usaha pada suatu negara. Kemudahan berbisnis dapat diukur sejak akan mulainya suatu bisnis, sampai dengan jika suatu bisnis berjalan tidak sesuai dengan rencana, dimana mengalami masalah atau kesulitan. Salah satu permasalahan atau kesulitan tersebut yang terjadi adalah masalah kesulitan keuangan yang mengakibatkan debitur tidak mampu membayar (gagal bayar) atas kewajiban atau utang-utangnya kepada kreditur atau yang lazim dikenal dengan istilah insolven (*insolvent*). Oleh karenanya, untuk tetap dapat mendorong agar bisnis yang mengalami kesulitan keuangan dapat tetap bertahan, maka negara harus menyediakan ketentuan kepailitan yang efisien dengan proses cepat dan berbiaya murah. Ketentuan kepailitan harus memberikan perlindungan atas hak-hak kreditur dan debitur secara seimbang. Proses kepailitan juga dapat meningkatkan harapan nilai pengembalian yang wajar bagi kreditur dan debitur. Dan yang terpenting adalah untuk menyelamatkan bisnis yang masih memiliki harapan untuk hidup (*viable*), yang pada akhirnya akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.³⁶

Doing Business menyajikan data baik bagi indikator individual maupun dua ukuran agregat yaitu skor jarak ke garis perbatasan (*distance to frontier score*) dan peringkat kemudahan berbisnis yang memberikan perspektif berbeda terhadap data. Skor *Distance to frontier* membantu dalam menilai tingkat mutlak dari kinerja peraturan dan bagaimana ia semakin baik dari waktu ke waktu. Ukuran ini

³⁶ Nirmala, "Kemudahan Berusaha (Easy Of Doing Business) Terkait Penyelesaian Kepailitan", dalam Jurnal Binus University Faculty Of Humanities. April 2018

menunjukkan jarak dari tiap-tiap ekonomi ke “garis perbatasan”, yang mewakili kinerja yang terbaik yang diamati pada masing-masing indikator lintas semua ekonomi dalam sampel Doing Business sejak tahun 2005 atau tahun ketiga dimana data dikumpulkan untuk indikator. (Untuk indikator yang dihitung sebagai skor, seperti misalnya kekuatan dari indeks hak legal atau kualitas dari indeks administrasi tanah, garis perbatasan ditentukan pada nilai tertinggi yang mungkin). Ini memungkinkan para pengguna untuk melihat baik celah antara kinerja ekonomi tertentu dan kinerja terbaik pada setiap titik dalam suatu kurun waktu dan untuk menilai perubahan mutlak dalam lingkungan peraturan ekonomi dari waktu ke waktu seperti diukur oleh Doing Business. Distance to frontier pertama-tama dihitung untuk tiap-tiap topik dan lalu dirata-ratakan lintas semua topik untuk menghitung jarak agregat ke skor garis perbatasan. Peringkat atas kemudahan berbisnis melengkapi skor distance to frontier dengan menyediakan informasi mengenai kinerja ekonomi dalam peraturan bisnis relatif terhadap kinerja dari faktor ekonomi lain seperti diukur oleh Doing Business.

Untuk tiap-tiap topik yang dicakup dan untuk semua topik, Doing Business menggunakan pendekatan rata-rata yang sederhana untuk mengukur indikator komponen, menghitung peringkat dan menentukan skor distance to frontier. Tiap-tiap topik yang dicakup oleh Doing Business terkait dengan aspek yang berbeda dari lingkungan peraturan bisnis. Skor distance to frontier dan peringkat dari tiap-tiap ekonomi bervariasi, seringkali secara substansial, lintas topik, mengindikasikan bahwa kinerja yang kuat dari sebuah ekonomi pada satu area peraturan dapat hadir bersama dengan kinerja yang lemah pada ekonomi yang lain.

Cara yang cepat untuk menilai keberagaman dari kinerja peraturan sebuah ekonomi adalah untuk melihat pada skor *distance to frontier* lintas topik.³⁷

b. Kemudahan Berbisnis Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam segala sesuatu kebijakan ataupun sebuah aturan pasti didalami atau dikaji terlebih dahulu apakah hal tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam ataupun tidak. Karena hal tersebut pasti menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak. Untuk mengkaji apakah kebijakan *easy doing business* mendatangkan kemanfaatan bagi kepentingan rakyat, dalam pengkajian tersebut perlu diadakan kajian yang secara mendetail yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Maka diperlukan seperangkat alat kajian yang relevan yaitu kaidah *fiqh Adz-Dzariah* (*Sad Adz-Dzariah* dan *Fath Adz-Dzariyah*) adalah seperangkat alat yang tepat. Adanya kaidah *fiqh Adz Dzariah* merupakan wujud nyata perlindungan terhadap *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* membawahi lima unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat mendasar dan mencakup keseluruhan kehidupan manusia sehingga sering disebut *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek menyeluruh) yaitu: 1) menjaga agama atau keyakinan (*hifzud-din*), 2) menjaga jiwa (*hifzun-nafs*), 3) menjaga keturunan (*hifzun-nasl*), 4) menjaga akal tau intelektual (*hifzul-‘aql*), dan 5) menjaga harta atau property (*hifzul-mal*).³⁸ Dari lima tujuan tersebut kemudian menjadi prinsip hak asasi manusia, yaitu: 1) hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup, 2) hak perlindungan atas keyakinan, 3) hak perlindungan terhadap akal dan pikiran, 4) hak

³⁷ World Bank Group Flagship Report. 2016. About Doing Business.

³⁸ Said Agil Husin Al Munawar. *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa. 2002. hlm 159

perlindungan terhadap hak milik, dan 5) hak berkeluarga atau memperoleh keturunan serta mempertahankan nama baik.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan *easy doing business* dapat dilihat bahwa adab hal negative yang berdampak buruk terhadap eksistensi Maqashid Syariah itu sendiri, sebab ada beberapa peraturan yang penting terhapuskan demi meningkatkan akses kemudahan berinvestasi di Indonesia. Dan berikut adalah analisisnya:

- 1) Memulai usaha, dengan adanya penyederhanaan perizinan melalui penghapusan izin HO (gangguan) dan izin tempat usaha maka akan berdampak kepada masyarakat. Maka perlu adanya pengawasan.
- 2) Izin mendirikan bangunan, dihapuskannya UKL/UPL dalam perizinan IMB mengakibatkan adanya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat adanya kegiatan usaha.
- 3) Pendaftaran property, mudahnya perubahan objek usaha kepada pihak lain tanpa adanya control hukum yang jelas.
- 4) Pembayaran pajak, adanya penyederhanaan pajak ataupun pengampunan pajak akan menurunkan penerimaan pajak, padahal pendapatan negara kita masih bergantung dari adanya pajak.
- 5) Akses perkreditan, mempermudah terjadinya praktik riba
- 6) Penegakan kontrak, mempermudah adanya sengketa bisnis antar pelaku usaha, sebab dengan adanya perselisihan maka ada bahwa segala sesuatu dengan mudah diselesaikan dengan jalur hukum.

- 7) Penyambungan listrik, dengan mudahnya mendapatkan listrik akan berdampak pada semakin besar konsumsi listrik
- 8) Perdagangan lintas negara, merebaknya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
- 9) Penyelesaian perkara kepailitan, memudahkah bagi kreditur untuk mempailitkan debitur yang pailit
- 10) Perlindungan terhadap investor minoritas, menunjukkan adanya kesenjangan sosial terhadap pelaku usaha

Adanya dampak negative tersebut membawa dampak yang negative terhadap kelima aspek fundamental Maqashid Syariah. Imam Asy-Syatibi mempertegas bahwasannya perlu adanya proteksi (hifz) yang harus dilakukan dalam dua acara, yaitu: *pertama*; proteksi dengan cara pelaksanaan dan penjagaan serta perlindungan (positif/wujud), *kedua*; dengan cara menghindari dan menghilangkan (negative/'adam).³⁹

Tabel 2.4 Klasifikasi Kemudahan Berbisnis

| Interval Nilai Peringkat | Klasifikasi |
|--------------------------|-------------------|
| 1 – 53 | Sangat Mudah |
| 54 – 97 | Mudah |
| 98 – 147 | Sedang |
| 148- 190 | Dibawah rata-rata |

Sumber: Easy of Doing Business (2020)

³⁹ Asy-Syaṭibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet.3, 1997

4. Indeks Persepsi Korupsi

a. Definisi Korupsi

Alatas mendefinisikan korupsi pada umumnya dilakukan oleh para pejabat sebagai pemberian seseorang kepada seorang pejabat atau pegawai negeri dengan maksud untuk mempengaruhi agar memberikan perhatian yang istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Ada setidaknya tujuh bentuk tindakan korupsi, diantaranya adalah kerugian negara, penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁴⁰

Menurut teori Robert Klitgaard korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (*Corruption = Directionary + Monopoly + Accountability*)⁴¹

Menurut Huntington korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena:

- 1) Korupsi berperan sebagai insentif finansial yang memungkinkan para pengusaha untuk menghindari keterlambatan
- 2) Korupsi mengurangi distorsi pasar yang berhubungan dengan struktur gaji yang buruk dalam birokrasi
- 3) Korupsi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan terbentuknya pasar gelap dan kegiatan penyelundupan yang bisa lebih efisien dibandingkan dengan jika proses transaksi melibatkan sektor public

⁴⁰ Alatas, Syed Hussein. 1982. Sosiologi Korupsi. Jakarta: Matahari Bhakti. hlm 15

⁴¹ Muhammad Fajar, Zul Azhar. "Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Asia Tenggara. Jurnal EcoGen. Volume 1, Nomor 3, 5 September 2018

- 4) Korupsi meningkatkan efisiensi apabila sektor swasta bersifat lebih efisien daripada sektor public dalam mengalokasikan sumber-sumber melalui struktur pajak.⁴²

Selaian korupsi juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, korupsi juga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Mauro korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena:

- 1) Menurunkan tingkat investasi
- 2) Menimbulkan distorsi pada perkembangan perusahaan dan pertumbuhan sektor ekonomi non formal
- 3) Menimbulkan distorsi pada pengeluaran dan investasi public serta memperburuk infrastruktur fisik.⁴³

Pendapat Mauro selaras dengan pandangan dari Blackburn yang menyatakan korupsi mengganggu aktifitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Sebagian besar para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan.⁴⁴

Sedangkan korupsi itu sendiri bisa diukur dengan menggunakan *Corruption Perception Index (CPI)*. *Transparency International (TI)* sudah mengembangkan CPI sejak tahun 1996 sebagai sebuah instrument untuk mengukur korupsi di dunia global. Tidak hanya TI yang mengeluarkan CPI. Lembaga-lembaga seperti *Asian*

⁴² Huntington, Samuel P., 1968. *Political Order in Changing Societies* (New Haven, CT: Yale University Press). hlm 69

⁴³ Irawanti, 2015. Pengaruh Good Local Governance, Net Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Korupsi (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. hlm 65

⁴⁴ Blackburn K; Bose N; and Haque M.E. 2005. "Public Expenditures, Bureaucratic Corruption and Economic Development", Economic Discussion Paper EDP-0530, The University of Manchester.

Development Bank, World Bank juga mengukur indeks tersebut dan menyerahkan hasil survey lembaga mereka kepada TI, kemudian data diolah sehingga hasil survey tersebut menghasilkan CPI. Di Indonesia alat pengukur korupsi bukan CPI, namun Indeks Persepsi Korupsi (IPK), keduanya menjadi acuan dalam melihat korupsi secara kuantitatif namun dengan metode yang berbeda. CPI dari hasil gabungan, sedangkan IPK didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan di kota-kota dan kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Terdapat beberapa variabel yang disertakan dalam proses wawancara untuk menghitung IPK seperti variabel suap, pemerasan, gratifikasi, dan keseriusan aparat dalam menangani permasalahan korupsi. Keseluruhan variabel tersebut diukur dengan cara meminta responden pelaku bisnis untuk memberikan penilaian tentang seberapa lazim suatu daerah melakukan praktik-praktek korupsi tersebut dan sampai sejauh mana pemerintah daerah dan aparat penegak hukum serius dalam memberantas korupsi.⁴⁵

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan indikator agregat yang menggabungkan berbagai sumber informasi tentang korupsi, sehingga memungkinkan untuk membandingkan tingkat korupsi setiap negara. Perolehan data IPK menggunakan skala dari 0-100. Jika skor IPK suatu Negara mendekati “0” maka tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut sangat tinggi dan sebaliknya, jika skor IPK suatu Negara mendekati “100” maka Negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang rendah atau dengan kata lain bersih dari korupsi. Terlepas dari berbagai kelemahan sistem pengukuran yang ada, peringkat dan skor IPK yang

⁴⁵ Baizatul Akman, Diana Sapha A.H. “*Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim). Vol.3 No.4 November 2018: 531-538. hlm 533

dipublikasikan berhasil memicu negara-negara dengan peringkat IPK terendah untuk serius dalam menangani dan memerangi korupsi di negaranya.⁴⁶

Indikator dalam penilaian indeks persepsi korupsi diantaranya adalah:

1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang diharapkan tentunya memiliki prosedur yang cepat dan efisien tanpa perlu membutuhkan banyak komponen persyaratan.

2. Petugas pelayanan sesuai prosedur

Petugas yang mempunyai kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur tentunya yang baik untuk digunakan

3. Tidak terdapat praktek percaloan

Tidak terdapat adanya calo atau orang yang menyediakan jasa penitipan dengan mendapatkan imbalan tertentu

4. Petugas pelayanan tidak diskriminatif

Tidak diskriminatif dalam artian tidak membeda-bedakan menurut golongan tertentu, tetapi melayani kepada setiap orang.

5. Tidak adanya pungutan liar

Pungutan liar biasanya dilakukan oleh petugas lapangan seperti dalam peti kemas barang, dan yang berkaitan dengan jasa.

⁴⁶ Muhammad Fajar, Zul Azhar. "Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Asia Tenggara. *Jurnal EcoGen*. Volume 1, Nomor 3, 5 September 2018

6. Petugas pelayanan tidak meminta imbalan

Petugas pelayanan tidak meminta imbalan apapun kepada seseorang kecuali sesuai dengan yang sudah diterapkan dalam peraturan ataupun perundang-undangan

7. Petugas pelayanan menolak pemberian.

Petugas pelayanan menolak pemberian apapun dari seseorang yang mungkin bisa dianggap sebagai tindak pidana atau gratifikasi.

b. Korupsi Dalam Pandangan Islam

Hampir seluruh agama yang ada dalam sejarah peradaban manusia mengajarkan tentang integritas moral dan menentang praktek korupsi. Agama Islam yang merupakan agama yang paling banyak dianut oleh sekitar 2,1 milyar umat manusia juga tegas dalam melawan tindakan korupsi. Korupsi dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip etika moralitas (ahlaq al-karimah), keadilan (al-adalah) dan akuntabilitas (al-amanah). dalam berbagai literatur maupun karya ilmiah tentang korupsi menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu persoalan-persoalan yang muncul dalam sebuah negara. Dalam dunia politik, korupsi dipandang mampu menghilangkan kepercayaan public terhadap pemerintah yang pada akhirnya menghilangkan legitimasi dan memunculkan ketidakstabilan politik pemerintahan yang ada.

Dalam pandangan Islam, uang negara yang bersumber dari rakyat pada dasarnya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan rakyatnya. Setiap rupiah dari uang rakyat ataupun pajak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat dan dipertanggungjawabkan

kepada rakyat ketika di dunia. Selain itu Al-Qur'an juga menegaskan untuk wajib berperilaku jujur dan benar atas setiap muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. At-Taubah: 119):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar”*.

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta Sebagian orang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahui”*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak akan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat. Upaya dalam mensejahterakan masyarakat merupakan tanggungjawab dari pemerintah melalui instrument fiskalnya (penerimaan dan pengeluaran pemerintah), namun kenyataannya kesejahteraan masyarakat belum optimal khususnya di negara-negara muslim. Faktanya yang ada sekarang fungsi pemerintah ini cenderung terhambat karena oleh adanya prakter korupsi, tentunya korupsi mampu melemahkan ketahanan anggaran di masing-

masing negara. Hal ini terindikasi oleh adanya korupsi yang menyebar hamper diseluruh kalangan instansi pemerintah.

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Korupsi

| Interval Nilai | Klasifikasi |
|----------------|------------------|
| 0 - 19 | Sangat Korup |
| 20 – 39 | Cenderung Korup |
| 40 – 59 | Rentan Korup |
| 60 - 79 | Cenderung Bersih |
| 80 - 100 | Sangat Bersih |

Sumber: Transparency International (2020)

5. Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah

Dari segi bahasa menurut Hafidhudin, zakat memiliki beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan serta perkembangan, kesucian, dan keberesan.⁴⁷ Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan atau dikeluarkan kepada yang berhak menurut perintah Allah. Mengutip pendapat dari Wahidi bahwa jumlah zakat yang dikeluarkan itu dapat memperbanyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.⁴⁸ Menurut Abbas, zakat memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam mendistribusikan kekayaan dan pendapatan, serta memberi pengaruh secara nyata pada kegiatan konsumsi

⁴⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

⁴⁸ Nurul Huda et. al, *Zakat Prespektif Mikro Makro Pendekatan Riset edisi Pertama*, (Yogyakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 1

masyarakat, zakat dapat pula mempengaruhi pilihan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan, investasi, atau konsumsi.⁴⁹

Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian infak yang dikeluarkan juga oleh orang kafir untuk kepentingan agamanya. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal haul dan nisab. Infak dapat dikeluarkan oleh siapa saja setiap orang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Menurut terminologi makna awal sedekah adalah menetapkan atau menancapkan sesuatu pada sesuatu. Sikap suka rela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya. Sedekah tidak terbatas pada sesuatu yang berbentuk materi atau harta, tetapi dapat berupa jasa, yang dapat bermanfaat bagi orang lain.⁵⁰

Lembaga Pengelola Zakat merupakan organisasi yang melakukan pengelolaan terhadap zakat yang memiliki kekuatan hukum secara formal yang memiliki kelebihan sebagai berikut: (1) untuk memberikan jaminan kepastian dalam menunaikan zakat; (2) untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat; (3) dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi beserta sasaran penerimaan zakat yang tepat; (4) untuk menunjukkan bahwa umat muslim memiliki prioritas terhadap solidaritas sesama manusia. Organisasi pengelola zakat atau LPZ dijelaskan dalam UU No 23 tahun 2011 adalah BAZNAZ dan LAZ BAZNAZ atau Badan Amil Zakat Nasional 208 yang merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional, sedangkan

⁴⁹ Anwar Abbas, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2009), hlm. 88.

⁵⁰ Nurlina T Muhyiddin et. al, *Ekonomi Bisnis Menurut Prespektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), hlm. 167.

LAZ BAZNAZ adalah lembaga yang mempunyai fungsi membantu dalam pengumpulan zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Penyaluran dana ZIS berfungsi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, potensi ZIS di Indonesia cukup besar mengingat sebagian masyarakat Indonesia adalah muslim, sehingga potensi ZIS tersebut dapat bermanfaat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat⁵¹ menyatakan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang islam atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat agama. Oleh sebab itu, ZIS dapat bermanfaat sebagai sumber dana sosial ekonomi untuk umat. Lebih jauh, tujuan dari dana ZIS tidak hanya untuk menyantuni orang yang kurang mampu secara konsumtif, tetapi tuuan lain yang lebih dalam yaitu untuk mengentaskan kemiskinan negara.

Sumber dari penerimaan zakat, infak, sedekah sendiri berasal dari bermacam-macam golongan. Untuk zakat sendiri berasal dari orang Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat di setiap tahunnya. Baik berupa zakat fitrah yang berada dalam bulan suci Ramadhan, ada juga zakat mal ataupun zakat profesi yang sekarang sedang gencar digaungkan oleh pemerintah. Adapun metode yang baru adalah pengelolaan zakat saham bari perusahaaa. Dengan demikian diharapkan mampu menambah penerimaan negara dari sektor zakat yang sangat besar ini agar

⁵¹ Undang undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 17.

bisa dikelola dengan baik untuk kemaslahatan orang banyak. Sedangkan untuk infak dan sedekah sendiri berasal dari kegiatan suka rela dari seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Jadi tidak ada ketentuan yang pasti dalam cara pengeluaran infak dan sedekah

Sedangkan dalam pengeluaran zakat sendiri ada beberapa kriteria tertentu terhadap kekayaan yang wajib dizakati, diantaranya: 1) milik orang Islam (merdeka), 2) berkembang, 3) milik penuh, 4) lebih dari kebutuhan biasa, 5) beba dari hutang, 6) sampai atau cukup senisab, 7) sampai atau cukup waktu, 8) sejumlah kadar tertentu.⁵²

a. Hakikat Zakat, Infaq, dan Sedekah

Dalam perspektif ekonomi syariah terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu melalui penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Zakat juga dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya, adapun caranya yaitu dengan memberikan sebagian harta yang sudah mencapai nisab dalam kurun waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.⁵³

Menurut Riyandono Islam melarang umatnya menimbun harta dan membiarkannya tidak produktif. Harta harus senantiasa berputar agar lebih memberikan kemaslahatan bagi pemeliknya sendiri, bagi orang lain maupun

⁵² Tontowi, Jauhari. *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan. 2011. hlm 40

⁵³ Sarah Hasanah Qoyyim, Sisca Debyola Widuhung. “*Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019*”. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* Vol. 1, No.2, Agustus 2020.

lingkungannya, dengan demikian harta tersebut tidak hanya berputar diantara para orang-orang kaya saja. Zakat yang diwajibkan dalam agama Islam mempunyai fungsi sebagai instrument untuk mendorong bahkan bisa digunakan untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya (asetnya) agar senantiasa produktif. Di satu sisi zakat tersebut juga akan membuat perekonomian berputar. Dengan berputarnya harta dalam perekonomian maka akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi), penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain zakat berarti dapat digunakan dalam mengendalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵⁴ Menurut Mufraini dalam bukunya inovasi penyaluran untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:⁵⁵

- 1) Penyaluran bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola penyalurannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.
- 2) Penyaluran bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah,

⁵⁴ Riyandono, Muhammad Nafik Hadi, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, infaq, shadaqah dan wakaaf)*, (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), hlm. 54.

⁵⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 153-154.

beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.

- 3) Penyaluran bersifat “produktif tradisional”, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Penyaluran dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Penyaluran dana zakat setidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini:⁵⁶ (1) Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga; (2) Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya; (3) Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas; (4) Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif; (5) Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ke tempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor organisasi pengelola zakat.

⁵⁶ Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), hlm 115-116.

a) Zakat

Menurut bahasa dari pengertian Hafidhudin, zakat memiliki beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, kesucian, dan keberesan.⁵⁷ Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menurut perintah Allah. Mengutip pendapat dari Wahidi bahwa jumlah zakat yang diserahkan itu dapat memperbanyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan kita dari kebinasaan.⁵⁸ Menurut Abbas, zakat memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam mendistribusikan kekayaan dan pendapatan, serta memberi pengaruh secara nyata pada kegiatan konsumsi masyarakat, zakat dapat pula berdampak pada pilihan seseorang dalam memanfaatkan pendapatannya untuk tabungan, investasi, atau konsumsi.⁵⁹

Allah SWT telah berbicara dengan tegas dalam menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Perintah tersebut terdapat dalam Q.S At-Taubah [9] ayat 60:⁶⁰


 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁵⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

⁵⁸ Nurul Huda et. al, *Zakat Prespektif Mikro Makro Pendekatan Riset edisi Pertama*, (Yogyakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 1

⁵⁹ Anwar Abbas, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2009), hlm. 88.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”

Dalam pelaksanaannya dana ZIS yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif). Penyaluran ini dibagi kedalam beberapa kategori sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana ZIS sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dana ZIS yang didapatkan harus disalurkan kepada 8 golongan orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kandungan QS At-Taubah ayat 60: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Dengan demikian dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran sebagian besar masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, zakat digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat karena pengeluaran besar mustahik. Dengan demikian, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan mendorong investasi.⁶¹

⁶¹ Ai Nur Bayina. “*Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth*”. *International Journal of Zakat* Vol.2 (2) 2017, hlm55-70

b) Infak dan Sedekah

Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk suatu urusan atau kepentingan sesuatu. Pengertian infak termasuk dana yang dikeluarkan juga oleh orang kafir untuk urusan atau kepentingan agamanya.⁶² Menurut terminologi makna awal sedekah adalah menetapkan atau menancapkan sesuatu pada sesuatu. Sikap suka rela serta pengeluarannya tidak terikat pada syarat-syarat tertentu. Sedekah tidak terbatas pada sesuatu yang berbentuk materi atau harta, tetapi juga jasa, yang dapat memberi manfaat untuk orang lain.⁶³

Berbeda dengan zakat yang penerimanya harus berasal dari delapan asnaf, *infaq* dan *shadaqah* boleh diberikan kepada siapa pun. Namun, ada ketentuan orang yang paling berhak dan wajib didahulukan untuk menerima harta tersebut. Paling utama adalah wajib diberikan kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 215:⁶⁴

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang

⁶² Nurlina T Muhyiddin et. al, *Ekonomi Bisnis Menurut Prespektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), hlm. 167.

⁶³ Nurlina T Muhyiddin et. al, *Ekonomi Bisnis Menurut Prespektif* hlm 170.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”

Menurut ayat tersebut, golongan yang berhak menerima infak adalah:⁶⁵ (1) Kedua orang tua, karena merekalah paling besar jasanya; (2) Para kerabat; (3) Anak-anak yatim; (4) Orang-orang miskin; (5) Dan orang-orang yang dalam perjalanan (yang kehabisan bekal). Pemberian sedekah tidak terbatas pada materi/harta dan bisa dengan apapun sesuai kemampuan seseorang dan apapun yang dimilikinya. Misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, bisa dikategorikan sedekah. Selain itu, *shadaqah* kepada keluarga terdekat adalah yang paling utama.

Tabel 2.5 Klasifikasi Penyaluran Dana ZIS

| Interval | Klasifikasi |
|----------------------|-------------|
| Semakin Meningkatkan | Baik |
| Semakin Menurun | Tidak baik |

Sumber: Arief Mufraini, (2012)

B. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam penelitian Asnidar menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan uji koefisiensi sebesar 0,469 atau 46,9%. Sedangkan sisanya sebesar 53,1%

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm 459.

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian.⁶⁶ Perbedaannya adalah peneliti memasukkan variabel inflasi dalam penelitiannya dan hanya mencakup Kabupaten Aceh Timur.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muqorrobin, *et al.* dari hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia ternyata memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dimana setiap pertumbuhan ekonomi naik 1 % maka indeks pembangunan manusia akan menurun sebesar 0,19%. Sebaliknya bila indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan 1 % maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 19,29%.⁶⁷ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian yang dilakukan Muqorrobin hanya menggunakan variabel tunggal yakni Indeks Pembangunan Manusia saja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi, *et al.* hasil olah data yang dilakukan untuk mencoba mengetahui indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali mengungkapkan bahwa variabel indeks pendidikan dan daya beli mempunyai pengaruh signifikan. Sedangkan indeks kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali.⁶⁸ Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah

⁶⁶ Asnidar, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Timur", dalam *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2, No. 1, April 2018

⁶⁷ Moh Muqorrobin, *et al.*, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur", dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi Unesa*. Volume 5 Nomor 3 (2017)

⁶⁸ Nyoman Lilya Santika Dewi, *et al.*, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali", dalam *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 3, Maret 2014.

dimana peneliti hanya menggunakan data dari Provinsi Bali saja, sehingga data yang digunakan kurang menyeluruh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanto, *et al* . dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi berdasarkan hasil uji simultan, semua variabel secara simultan memiliki berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten lamongan.⁶⁹ Perbedaan dari penelitian terdahulu terdapat pada variabel yang digunakan yakni hanya menggunakan dua variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kadafi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana dalam penelitian tersebut juga meneliti tentang pengaruhnya Inflasi, Subsidi BBM, Nilai Investasi dan Ekspor.⁷⁰ Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode Error Correction Model (ECM).

2. Pengaruh Indeks Kemudahan Berbisnis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rina, *et al*. dengan metode *explanatory research* melalui pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh *Easy Doing Business* atau kemudahan berbisnis di negara Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia terhadap korupsi

⁶⁹ Aris Budi Susanto, *et c*, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan”, dalam *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Unesa*, Kampus Ketintang Surabaya. 2017

⁷⁰ Satria Kadafi Nararendra, “Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Subsidi Bbm, Nilai Investasi, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Diy (Tahun 2000-2015)”, dalam *Jurnal Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta 2018

dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Hasil analisis pengaruh human development terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan terdapat pengaruh pada negara Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, sedangkan pada negara Indonesia dan Vietnam tidak terdapat pengaruh.⁷¹ Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian sebelumnya menggunakan banyak negara dalam sampel penelitiannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tawas yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dapat disimpulkan diharapkan ke depan untuk melakukan bisnis di SULUT bisa semakin mudah. Juga upaya pemerintah untuk menyederhanakan sistem birokrasi di tiga area seperti proses memulai bisnis, proses mendapatkan kredit dan proses pembayaran pajak, akan mengundang lebih banyak investor. Perubahan orientasi kebijakan, bagaimana merespon kebijakan, dan upaya serius memperbaiki implementasi kebijakan perlu dilakukan, sehingga tingkat dan kondisi perekonomian juga semakin bertumbuh.⁷² Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitiannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Theodoris, *et al.* menunjukkan bahwa secara parsial Indeks kemudahan Berbisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB di negara ASEAN. Sedangkan secara simultan yaitu variabel

⁷¹ Husnul Alfisyah Rina, etc, "Pengaruh Human Development Dan Ease Of Doing Business Terhadap Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Negara - Negara Di Asia Tenggara Tahun 2004-2015)". dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)* Vol. 60 No. 1 Juli 2018|

⁷² Hendra Tawas, "Kemudahan Berbisnis Dan Investment Grade Sebagai Modal Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara, dalam *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen* Vol 5 ,No.4, 2017: 523-538 Edisi Khusus 1

kemudahan berbisnis, *foreign direct investmen*, dan populasi berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel populasi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada variabel lain.⁷³ Perbedaan penelitian terdahulu adalah sampel yang digunakan meliputi negara ASEAN, sedangkan penulis hanya menggunakan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia saja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nanda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Ease Of Doing Business* dan *Business Confidence* terhadap *Global Competitiveness Index* (studi pada negara Amerika Serikat, China, dan Indonesia Tahun 2005 – 2017)”. Hasil penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara kemudahan berusaha dengan kepercayaan bisnis dan kepercayaan bisnis keyakinan dengan indeks daya saing global. Namun, ada pengaruh antara kemudahan berbisnis dengan indeks daya saing global. Hasil penelitian di China menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara kemudahan melakukan bisnis dengan keyakinan bisnis dan keyakinan bisnis dengan indeks daya saing global. Tapi, ada pengaruh antara kemudahan berusaha dengan indeks daya saing global, dan tidak ada pengaruh antara hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara kemudahan berbisnis dengan keyakinan bisnis dan keyakinan bisnis dengan indeks daya saing global. Tapi disana merupakan pengaruh antara kemudahan berusaha dengan indeks daya saing global.⁷⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana

⁷³ Daniel Theodoris, “Pengaruh Indeks Kemudahan Berbisnis, Foreign Direct Investment, Dan Populasi Penduduk Terhadap Perekonomian Asean”, dalam *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.6, No.12 Desember 2017

⁷⁴ Dhira Aditya Nanda, et al, “Pengaruh Ease Of Doing Business Dan Business Confidence Terhadap Global Competitiveness Index (Studi Pada Negara Amerika Serikat, China, Dan Indonesia Tahun 2005 – 2017)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)* Vol. 62 No. 2 September 2018

penelitian terdahulu menggunakan variabel indeks daya saing global sebagai variabel dependen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan yang bertujuan untuk meninjau Ease of Doing Business (EODB) dalam Perspektif Kaidah Fiqh Adz-Dzariah dalam Rangka Perlindungan Terhadap Maqashid Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya program Ease Of Doing Business (EODB) merupakan kebijakan yang disusun sebagai rencana mempermudah pengembangan investasi di wilayah Indonesia, sarana perlindungan hukum dan pencipta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan membentuk iklim persaingan usaha yang lebih kompetitif, meskipun adanya kebijakan ini mendatangkan kemanfaatan bagi perekonomian, di sisi lain adanya kebijakan ini justru membuka celah bagi adanya praktik pengeksploitasian terhadap sumber daya (baik alam maupun manusia), pengesampingan aspek lingkungan hidup dan etika bisnis sehingga dapat mengancam eksistensi dari maqashid syariah itu sendiri.⁷⁵ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian terdahulu variabel Easy Doing Business ditinjau dari segi Maqashid Syariahnya.

3. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nawatmi, *et al.* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara-negara Asia Pasifik. Bahwa variabel korupsi memiliki signifikansi yang positif terhadap 12 Negara Asia Pasifik dalam hal pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis yang lebih

⁷⁵ Dandy Ramadhan, “Analisis Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Ease Of Doing Business (Eodb) Ditinjau Melalui Perspektif Kaidah Fiqh Adz-Dzariah Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Maqashid Syariah”. International Summit On Science Technology And Humanity (Iseth2019) Advancing Scientific Thought For Future Sustainable Development

mendalam menunjukkan bahwa dari 12 negara yang dijadikan obyek penelitian ternyata hanya lima negara yang korupsinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dua negara positif signifikan (Jepang dan Korea Selatan) dan sisanya (Brunei Darusalam, Timor Leste dan Kamboja) negatif signifikan.⁷⁶ Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada data *time series* nya yakni mulai tahun 2002-2011.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Charisma, *et al.* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di sembilan negara Asia tahun 2011-2014. Berdasarkan hasil regresi diperoleh bahwa variabel korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Impor mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan basis negara Indonesia karena negara Indonesia mempunyai tingkat korupsi paling tinggi dibandingkan dengan negara Asia yang lain pada tahun 2014.⁷⁷ Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada data *time series* nya yakni mulai tahun 2011-2014 dan hanya menggunakan indikator korupsi sebagai variabel utamanya saja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lutfi, *et al.* yang bertujuan untuk mengetahui dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan di 4 Negara ASEAN tahun 2004-2015. Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

⁷⁶ Sri Nawatmi, *et c.*, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik", dalam *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 31 No. 1 Januari 2016

⁷⁷ Yosafat Charisma, Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014, *Jurnal Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Fakultas Ekonomi Jl. Babarsari 43-44 Yogyakarta

meskipun tidak signifikan, sedangkan variabel lain yang berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah investasi publik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dampak negatif korupsi tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melainkan mengarah pada inefisiensi proses produksi dan misal lokasi sumber daya.⁷⁸ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dimana data yang digunakan dalam *time series* yakni dimulai tahun 2004 - 2015.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajar, *et al.* yang bertujuan untuk mengetahui dampak indeks persepsi korupsi dan pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang dilakukan mulai tahun 2000-2017 menunjukkan bahwa hasil analisis regresi panel yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial indeks persepsi korupsi dan pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara.⁷⁹ Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dimana peneliti terdahulu hanya menggunakan dua variabel yakni indeks persepsi korupsi dan pembangunan manusia didalam penelitiannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ichvani, *et al.* dalam penelitiannya yang menguji tentang pengaruh korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN dalam kurun waktu 1997-2016 dengan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan

⁷⁸ Akhmad Faisal Lutfi, etc, "Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN", dalam *Jurnal E-JEBA* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020

⁷⁹ Muhammad Fajar rtc, "Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Aia Tenggara", dalm *Jurnal EcoGen*, Volume 1, Nomor 3, 5 September 2019

bahawa indeks persepsi korupsi, konsumsi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel keterbukaan perdagangan berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi.⁸⁰ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dimana penelitian terdahulu menggunakan variabel konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan keterbukaan perdagangan untuk variabel pendamping indeks persepsi korupsi.

4. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, *et al*, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran dana ZIS dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data dalam penelitian ini sekunder diambil dari BAZNAZ dan tingkat inflasi Dai BI, dengan data bulanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dana ZIS dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011-2015.⁸¹ Perbedaan yang ada didalam penelitian

⁸⁰ Lutfiana Fiqry Ichvani *et al*, "Pengaruh Korupsi, Konsumsi, pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi di 5 Negara ASEAN", dalam *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 1 2019*, P-ISSN: 2541-433X E-ISSN: 2508-0205

⁸¹ Rachmasari Anggraini, *et al*, Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.2, Agustus 2018.

terdahulu adalah dimana peneliti menggunakan penambahan variabel inflasi yang didapat dari data yang diolah dari Bank Indonesia.

Menurut penelitian Rahma, *et al*, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatra Utara periode 2016-2018 dengan menggunakan metode kuantitatif menunjukkan bahwa dari hasil analisis regresi tersebut bahwa zakat, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2016-2018, sedangkan zakat dan infak tidak berpengaruh signifikan. Namun secara simultan zakat, infak, sedekah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2016-2018.⁸² Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah populasi dari penelitian tersebut hanya berada dalam satu provinsi yakni Sumatera Utara dan pengamatannya hanya 3 tahun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Qoyyim menggunakan metode regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji variabel penyaluran dana zakat, infak, sedekah menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015-2019. Dan variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2015-2019. Secara simultan keduanya yakni ZIS dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2015-2019.⁸³ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dimana variabel yang

⁸² Ade Rahma, *et al*, Analisis Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2018, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah MUTLAQ*, Vol 1 No1 (2020)

⁸³ Sarah Hasanah Qoyyim, *et al*, Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Periode 2015-2019, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 1, No 2, Agustus 2020*

digunakan hanya ZIS dan juga tingkat Inflasi serta data yang digunakan dari tahun 2015-2019.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dalam studinya yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Penelitian ini berjenis Kuantitatif, dengan menggunakan metode analisis regresi panel dengan driscoll dan kesalahan standar kraay. Hasil dari penelitian ini adalah zakat, infak, dan sedekah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁸⁴ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dimana ada perbedaan penambahan variabel Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemudahan Berbisnis, dan Indeks Persepsi Korupsi dalam penelitian yang sekarang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arwani dalam analisisnya mengenai pengaruh zakat, infak, sedekah (ZIS) serta indeks pembangunan manusia dan pengangguran dengan menggunakan uji regresi linier berganda pada variabel dependen pertumbuhan ekonomi dapat diketahui bahwa variabel ZIS dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2013-2017.⁸⁵ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel indeks kemudahan berbisnis dan indeks persepsi korupsi. Serta time series yang digunakan dalah dimulai tahun 2004-2019.

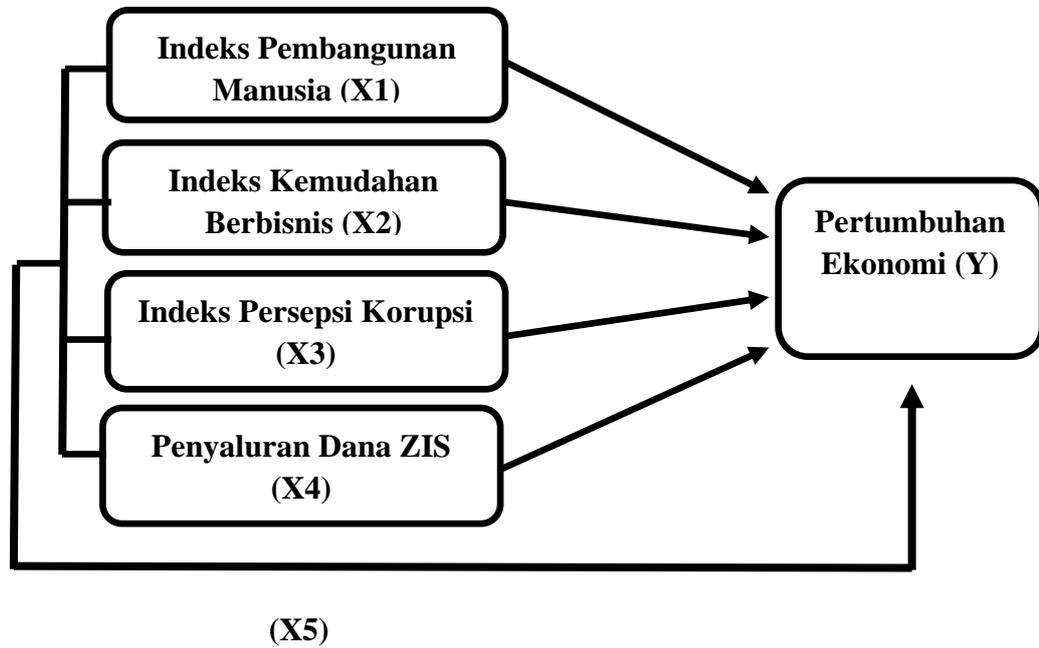
⁸⁴ Dewi Purwanti, Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 6(01), 2020, hlm. 101-107.

⁸⁵ Agus Arwani, etc, The Effect of Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Human Development Index dan Unemployment on Indonesia's Economic Growth, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary*, 2020, Vol. 5, No. 2, hal 159-173

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1

Kerangka Konseptual



Keterangan:

1. Pengaruh X1 terhadap Y didasarkan pada teori Ramires⁸⁶ dan penelitian terdahulu dari Asnidar⁸⁷, Muqorrobin⁸⁸, Dewi⁸⁹, Santoso⁹⁰, dan Kadafi.⁹¹
2. Pengaruh X2 terhadap Y didasarkan pada teori Nirmala⁹² dan penelitian terdahulu dari Rina⁹³, Trawas⁹⁴, Theodoris⁹⁵, Nanda⁹⁶, dan Ramadhan⁹⁷.

⁸⁶ Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart. 1998. Economic Growth and Human Capital. QEH Working Paper No. 18

⁸⁷ Asnidar, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Timur", dalam *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2, No. 1, April 2018

⁸⁸ Moh Muqorrobin, etc, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur", dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi Unesa*. Volume 5 Nomor 3 (2017)

⁸⁹ Nyoman Lilya Santika Dewi, etc, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali", dalam *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 3, Maret 2014.

⁹⁰ Aris Budi Susanto, etc, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan", dalam *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Unesa*, Kampus Ketintang Surabaya. 2017

⁹¹ Satria Kadafi Nararendra, "Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Subsidi Bbm, Nilai Investasi, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Diy (Tahun 2000-2015)", dalam *Jurnal Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta 2018

⁹² Nirmala, "Kemudahan Berusaha (Easy Of Doing Business) Terkait Penyelesaian Kepailitan", dalam *Jurnal Binus University Faculty Of Humanities*. April 2018

⁹³ Husnul Alfisyah Rina, etc, "Pengaruh Human Development Dan Ease Of Doing Business Terhadap Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Negara - Negara Di Asia Tenggara Tahun 2004-2015)". dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)* Vol. 60 No. 1 Juli 2018

⁹⁴ Hendra Tawas, "Kemudahan Berbisnis Dan Investment Grade Sebagai Modal Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara, dalam *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen* Vol 5 ,No.4, 2017: 523-538 Edisi Khusus 1

⁹⁵ Daniel Theodoris, "Pengaruh Indeks Kemudahan Berbisnis, Foreign Direct Investment, Dan Populasi Penduduk Terhadap Perekonomian Asean", dalam *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.6, No.12 Desember 2017

⁹⁶ Dhira Aditya Nanda, etc, "Pengaruh Ease Of Doing Business Dan Business Confidence Terhadap Global Competitiveness Index (Studi Pada Negara Amerika Serikat, China, Dan Indonesia Tahun 2005 – 2017)", *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)* Vol. 62 No. 2 September 2018

⁹⁷ Dandy Ramadhan, "Analisis Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Ease Of Doing Business (Eodb) Ditinjau Melalui Perspektif Kaidah Fiqh Adz-Dzariah Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Maqashid Syariah". International Summit On Science Technology And Humanity (Iseth2019) Advancing Scientific Thought For Future Sustainable Development

3. Pengaruh X3 terhadap Y didasarkan pada teori Houtington⁹⁸ dan penelitian terdahulu dari Nawatmi⁹⁹, Charisma¹⁰⁰, Lutfi¹⁰¹, Fajar¹⁰², dan Ichvani¹⁰³.
4. Pengaruh X4 terhadap Y didasarkan pada teori Riyandono¹⁰⁴ dan penelitian terdahulu dari Anggraini¹⁰⁵, Rahma¹⁰⁶, Qoyyim¹⁰⁷, Purwanti¹⁰⁸, dan Arwani.¹⁰⁹

⁹⁸ Huntington, Samuel P., 1968. *Political Order in Changing Societies* (New Haven, CT: Yale University Press). Hal 69

⁹⁹ Sri Nawatmi, etc, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik", dalam *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 31 No. 1 Januari 2016

¹⁰⁰ Yosafat Charisma, Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014, *Jurnal Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Fakultas Ekonomi Jl. Babarsari 43-44 Yogyakarta

¹⁰¹ Akhmad Faisal Lutfi, etc, "Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN", dalam *Jurnal E-JEBA* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020

¹⁰² Muhammad Fajar rtc, "Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Aia Tenggara", dalm *Jurnal EcoGen*, Volume 1, Nomor 3, 5 September 2019

¹⁰³ Lutfiana Fiqry Ichvani etc, "Pengaruh Korupsi, Konsumsi, pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi di 5 Negara ASEAN", dalam *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* Volume 4 Nomor 1 2019, P-ISSN: 2541-433X E-ISSN: 2508-0205

¹⁰⁴ Riyandono, Muhammad Nafik Hadi, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf)*, (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), hlm. 54.

¹⁰⁵ Rachmasari Anggraini, etc, Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.2, Agustus 2018.

¹⁰⁶ Ade Rahma, etc, Analisis Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2018, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah MUTLAQ*, Vol 1 No1 (2020)

¹⁰⁷ Sarah Hasanah Qoyyim, etc, Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Periode 2015-2019, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 1, No 2, Agustus 2020*

¹⁰⁸ Dewi Purwanti, Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 6(01), 2020, hlm. 101-107.

¹⁰⁹ Agus Arwani, etc, The Effect of Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Human Development Index dan Unemployment on Indonesia's Economic Growth, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary*, 2020, Vol. 5, No. 2, hal 159-173